

PENGENTASAN KEMISKINAN PERDESAAN MELALUI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF, PARIWISATA DAN MODAL SOSIAL

ALLEVIATING OF RURAL POVERTY THROUGH CREATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT, TOURISM, AND SOSIAL CAPITAL

Alfrojems

Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia
email : alfro.jems@gmail.com

Triyanti Anugrahini

Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia
email : triyantia@gmail.com

Abstrak

Kemiskinan pedesaan di Indonesia menjadi permasalahan yang cukup krusial. Saat ini terdapat 15.57 juta orang miskin berada di pedesaan dan angka ini berarti 60.53% dari total masyarakat miskin yang ada di Indonesia. Begitu banyak program pemerintah dalam upaya mengentaskan permasalahan ini. Salah satu yang menjadi sorotan adalah dengan menguatkan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif memiliki irisan yang cukup kuat dengan pariwisata, dimana pariwisata yang cukup berkembang dimasyarakat saat ini adalah CBT atau *community based tourism*. Pelaksanaan CBT tentu memerlukan kekuatan masyarakat, dan hal ini dapat diperoleh melalui modal sosial yang ada pada masyarakat itu sendiri. Melalui studi kepustakaan artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi upaya pengentasan kemiskinan pedesaan melalui pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata dan modal sosial untuk menjadi inovasi dalam pengentasan kemiskinan di pedesaan. Rekomendasi yang diusulkan dalam penelitian ini adalah perlunya penguatan modal sosial untuk dapat memaksimalkan potensi wilayah sehingga pariwisata dan ekonomi kreatif dapat terbangun dan menjadi kekuatan dalam upaya pengentasan kemiskinan di pedesaan.

Kata kunci: kemiskinan, pedesaan, ekonomi kreatif, pariwisata, modal sosial.

Abstract

Rural poverty in Indonesia is a quite crucial problem. At present there are 15.57 million poor people in rural areas and this figure means 60.53% of the total poor people in Indonesia. poverty is a problem that has a fairly high complexity. There are so many government programs in an effort to alleviate this problem. One of the highlights is by strengthening the crisis economy. The creative economy has a fairly strong slice of tourism, where tourism is quite developed in the community today is CBT or community based tourism. The implementation of CBT certainly requires community strength, and this can be obtained through social capital that exists in the community itself. Through the literature study this article aims to identify rural poverty alleviation efforts through the development of creative economics, tourism and social capital to become innovations in alleviating poverty in rural areas. The recommendation proposed in this study is the need to strengthen social capital in order to maximize the potential of the region so that tourism and the creative economy can be built and become a force in efforts to alleviate poverty in rural areas.

Keywords: poverty, rural, creative economic, tourism, social capital.

PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi persoalan penting di dunia begitupun dengan Indonesia. permasalahan kemiskinan dianggap menjadi inti dari permasalahan lainnya seperti prostitusi, gelandangan, pengemis, dan lain sebagainya. Menurut World Bank saat ini di dunia terdapat kurang lebih 736 juta jiwa yang tersebar diseluruh dunia, angka ini berarti kurang lebih 10% dari jumlah penduduk dunia (Kompas, 2018).

Sama halnya dengan kondisi di dunia, saat ini berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik jumlah masyarakat yang masuk ke dalam kategori miskin hingga September 2018 adalah 25.67 juta jiwa atau 9.66%. Lebih lanjut jumlah penduduk miskin di Indonesia apabila dilihat dari lokasi wilayahnya maka dapat dilihat dari wilayah perdesaan dan perkotaan. Jumlah penduduk miskin diperdesaan mencapai 15.54 juta orang atau 60.53% sedangkan untuk wilayah perkotaan mencapai 10.13 juta orang atau 39.47% dari total masyarakat miskin di Indonesia. Berdasarkan data tersebut diperoleh informasi bahwa kemiskinan yang ada di Indonesia didominasi oleh masyarakat yang berada di wilayah perdesaan, padahal sampai tahun 2018 jumlah penduduk Indonesia yang hidup di wilayah perdesaan mencapai 48% atau lebih kecil jika dibandingkan dengan wilayah perkotaan yang mencapai 52% (BPS. Persentase Penduduk Miskin Pada September 2018 Sebesar 9,66 Persen.2018).

Di Indonesia sampai tahun 2018 terdapat 75.436 desa yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. selanjutnya berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pendataan potensi desa (Podes) oleh Badan Pusat Statistik diperoleh Indeks Pembangunan Desa (IPD) menunjukkan bahwa desa dengan status desa tertinggal mencapai 14.461 desa atau 19.17% (Pikiran

Rakyat. Tia Dwitiani Komalasari. Masih Ada 14.461 Desa Tertinggal. 2018).

Melihat kondisi dari data tersebut, maka sejak tahun 2015 pemerintah menerapkan program dana desa yang bertujuan untuk memberikan pemicu kepada wilayah perdesaan untuk mampu mengeksplorasi segala potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah perdesaan sehingga mampu meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat setempat. Di sisi lain Wilayah perdesaan merupakan wilayah yang sangat menggambarkan kondisi dari kehidupan masyarakat Indonesia secara utuh. Hal ini dikarenakan masyarakat di wilayah perdesaan sangat terkenal dengan budaya atau tradisi yang begitu kental dengan nilai-nilai kebersamaan seperti gotong royong, saling membantu dan lain sebagainya dan bahkan dari nilai-nilai tersebut menghasilkan produk hasil karya yang menggambarkan ciri khas dari wilayah perdesaan tersebut.

Produk hasil karya yang menjadi ciri khas dari produk wilayah perdesaan apabila dikelola secara maksimal dapat menjadi sumber kekuatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perdesaan. Ini sejalan dengan ekonomi kreatif yang saat ini begitu didukung oleh pemerintah. Bahkan untuk memaksimalkan potensi ekonomi kreatif ini pemerintah pusat membuat badan khusus yang menangani ekonomi kreatif yakni Badan Ekonomi Kreatif. Saat ini perkembangan ekonomi kreatif Indonesia mengalami fase yang positif, tercatat ekonomi kreatif di tahun 2018 mampu memberikan kontribusi kepada Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dengan angka 1000 triliun atau 7.44% (Kompas, 2018).

Perkembangan ekonomi kreatif saat ini sesungguhnya dapat dilihat juga dari perkembangan ekonomi kreatif sejak tahun 2011 hingga 2015 dan hal ini dapat dilihat pada tabel

berikut ini yang bersumber dari BPS dan Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dalam jurnal Juli Panglima Saragih yang berjudul Pengembangan Industri Kreatif dalam Mendukung Kinerja Industri Nasional.

Tabel 1. Perkembangan Ekonomi Kreatif dari Berbagai Sektor Tahun 2011-2015 dalam (%).

No.	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Makanan dan Minuman	5.24	5.31	5.14	5.32	5.61
2.	Tekstil dan Pakaian Jadi	1.38	1.35	1.36	1.32	1.21
3.	Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0.28	0.25	0.26	0.27	0.27
4.	Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	0.76	0.70	0.70	0.72	0.67
5.	Furnitur	0.28	0.26	0.26	0.27	0.27
6.	Ekspor Kerajinan Tangan	-	15.54	17.77	20.18	21.72
7.	Fashion dan Kerajinan	-	44.3	24.8	-	-
8.	Periklanan	15	20	-	-	-

Sumber: BPS Data dan Informasi Kementerian Perindustrian RI (Saragih: 2017)

Berdasarkan data di atas dapat diperoleh gambaran bahwa kondisi ekonomi kreatif saat ini dapat dikatakan mampu memberikan harapan untuk mencapai kesejahteraan bagi kelompok masyarakat terlebih dengan konsep ekonomi kreatif yang lebih menitikberatkan kepada kekayaan individual dari setiap individu maupun kelompok. Melalui Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif dijelaskan bahwa terdapat 16 subsektor ekonomi kreatif yang apabila dipelajari memiliki kecenderungan keterikatan yang cukup kuat dengan pariwisata, beberapa subsektor yang dimaksud seperti periklanan, barang seni, kerajinan, fashion, musik, seni pertunjukkan dan kuliner. Banyaknya subsektor yang relevan

dengan pariwisata mengakibatkan ekonomi kreatif tidak bisa lepas dari pariwisata begitupun sebaliknya.

Pariwisata Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangan ini dapat dibuktikan dengan jumlah wisatawan dan kontribusi devisa Negara yang diperoleh dari pariwisata. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS jumlah wisatawan asing yang datang ke Indonesia pada tahun 2018 mencapai 15.81 juta wisatawan angka ini naik 12.58% dari tahun 2017, selain itu ditinjau dari pendapatan Negara berupa devisa, menurut data dari Kementerian Pariwisata RI, pariwisata menghasilkan USD 17 Miliar, angka ini mengindikasikan bahwa pariwisata menjadi sektor dengan penghasil devisa terbesar untuk ekonomi Indonesia saat ini.

Perkembangan pariwisata Indonesia yang begitu pesat tidak lepas dari perkembangan wilayah yang menjadi destinasi utama para wisatawan mancanegara untuk berwisata di Indonesia. Hal ini sejalan dengan program dari pemerintah dalam mengembangkan sepuluh destinasi unggulan terbaru dengan nama program “10 Bali Baru”, sehingga dengan ini diharapkan para wisatawan tidak hanya mengenal Bali saja sebagai tempat wisata karena masih banyak sekali tempat wisata yang ada di Indonesia dengan keindahan tidak kalah dengan Bali. Adapun lokasi wilayah ke 10 destinasi tersebut meliputi Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara, Tanjung Kelayang di Provinsi Bangka Belitung, Candi Borobudur di Provinsi Jawa Tengah, Labuan Bajo di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Mandalika Nusa di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Seribu di Provinsi DKI Jakarta, Morotai di Provinsi Maluku Utara, Wakatobi di Provinsi Sulawesi Selatan, Bromo Tengger Semeru di Provinsi Jawa Timur, dan Tanjung Lesung di Provinsi Banten, ini sebagaimana yang

disampaikan oleh Menteri Pariwisata Republik Indonesia dalam Regional Investment Forum (Tempo, 2018).

Berdasarkan lokasi wisata yang menjadi destinasi utama wisata di atas, dapat terlihat bahwa karakteristik wilayah yang menjadi destinasi utama wisata di Indonesia adalah keindahan alam, yang sebagian besar dari lokasi tersebut berada di daerah perdesaan. Selayaknya wilayah perdesaan 10 destinasi wisata tersebut memiliki karakteristik masyarakat yang begitu majemuk dan memiliki nilai kebersamaan serta gotong royong yang baik dan tentu ini memberikan tambahan nilai tersendiri khususnya dalam upaya mengembangkan pariwisata di setiap wilayah tersebut.

Artikel ini bertujuan untuk menggali potensi perdesaan khususnya dalam bidang ekonomi kreatif, pariwisata dan modal sosial untuk mempercepat pembangunan desa sekaligus mengupayakan pengentasan kemiskinan bagi masyarakat yang ada di perdesaan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tantan Hermansyah (2014) yang mengemukakan bahwa pengembangan modal sosial mampu membentuk kesinambungan dan perubahan industri kreatif yang ada di Bandung. Oleh karena itu artikel ini akan memahami secara mendalam perdesaan dengan segala potensi alamiah yang ada dalam masyarakat dapat digunakan untuk menunjang pengentasan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata dan modal sosial.

Adapun metode yang digunakan yakni kajian literatur dari Pengkajian buku, artikel, jurnal, berita koran dan berbagai dokumen resmi terkait dengan pengembangan wilayah pedesaan dan isu lain yang masih relevan dengan judul artikel ini seperti kajian tentang pengembangan wilayah, desa wisata, dan modal sosial. Hal ini sejalan dengan pengertian kajian literatur

yakni bertambah terus menerus (berakumulasi), bahwa topik penelitian, masyarakat dan daerah penelitian kita sudah pernah dirambah orang sebelumnya, dan kita dapat belajar dari apa yang telah dilakukan orang-orang tersebut (Neuman, 2003).

PEMBAHASAN

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global. Artinya, kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi dan menjadi perhatian banyak orang di dunia ini. Saat ini kemiskinan memiliki definisi yang cukup banyak. Sebagian orang memahami istilah kemiskinan dari perspektif subyektif dan komparatif, sementara yang lain melihatnya dari segi moral dan evaluatif. Walaupun sebagian besar konsepsi mengenai kemiskinan sering dikaitkan dengan aspek ekonomi, sejatinya kemiskinan juga menyangkut pula dimensi material, sosial, kultural dan institusional serta struktural (Suharto, 2014). Hal ini diperkuat melalui pernyataan menurut Piven dan Cloward (1993) dalam Swanson (2001) yang mengatakan bahwa kemiskinan berhubungan erat bukan hanya terkait dengan kekurangan materi, rendahnya penghasilan, namun juga adanya kebutuhan sosial:

1. Kekurangan materi. Kemiskinan menggambarkan adanya kelangkaan materi atau barang-barang yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kesulitan yang dihadapi orang dalam memperoleh barang-barang yang bersifat kebutuhan dasar.
2. Kekurangan penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna “memadai” di sini sering dikaitkan dengan standar atau garis kemiskinan (*poverty line*) yang berbeda-beda dari satu negara ke negara yang lainnya, bahkan dari satu komunitas ke

komunitas lainnya dalam satu Negara.

4. Kesulitan memenuhi kebutuhan sosial termasuk keterkucilan sosial (*social exclusion*), ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan pelayanan sosial dan rendahnya aksesibilitas lembaga-lembaga pelayanan sosial, seperti lembaga pendidikan, kesehatan dan informasi.

Dengan demikian, kemiskinan pada hakikatnya menunjuk pada situasi kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang dialami oleh seseorang, baik akibat ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan hidup, maupun akibat ketidakmampuan Negara atau masyarakat dalam memberikan perlindungan sosial kepada warganya. Menurut Suharto (2014) terdapat Sembilan kriteria yang menandai kemiskinan:

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan);
2. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental;
3. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil);
4. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia (buta huruf, rendahnya pendidikan dan keterampilan, sakit-sakitan) dan keterbatasan sumber alam (tanah tidak subur, lokasi terpencil, ketiadaan infrastruktur jalan, listrik, dan air);
5. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual (rendahnya pendapatan dan aset) maupun massal (rendahnya modal sosial, ketiadaan fasilitas umum);
6. Ketidadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang memadai dan berkesinambungan;

7. Ketidadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi);
8. Ketidadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga atau tidak adanya perlindungan sosial dari Negara dan masyarakat);
9. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.

Selain karakteristik seperti yang digambarkan di atas kemiskinan sendiri disebabkan oleh beberapa faktor. Sangat jarang ditemukan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor tunggal. Secara konseptual, kemiskinan diakibatkan oleh empat faktor (Suharto 2014), yaitu:

1. Faktor individual. Terkait dengan aspek patologis, termasuk kondisi fisik dan psikologis. Orang yang terkategori miskin disebabkan oleh perilaku, pilihan, atau kemampuan dari orang tersebut dalam menghadapi kehidupannya;
2. Faktor sosial. Kondisi-kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin. Misalnya, diskriminasi berdasarkan usia, gender, etnis yang menyebabkan seseorang menjadi miskin. Termasuk dalam faktor ini adalah kondisi sosial dan ekonomi keluarga miskin yang biasanya menyebabkan kemiskinan antar generasi;
3. Faktor kultural. Kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan. Faktor ini secara khusus sering menunjuk pada konsep “kemiskinan kultural” atau “budaya kemiskinan” yang menghubungkan kemiskinan dengan kebiasaan hidup atau mentalitas. Penelitian oleh Oscar Lewis di Amerika Latin menemukan bahwa orang miskin memiliki sub-kultur atau kebiasaan tersendiri, yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya (Suharto, 2014). Sikap-sikap *negative* seperti malas, fatalisme atau menyerah pada nasib, tidak memiliki jiwa

wirausaha, dan kurang menghormati etos kerja, misalnya sering ditemukan pada orang-orang miskin;

4. Faktor struktural. Menunjuk pada struktur atau sistem yang tidak adil, tidak sensitive dan tidak *accessible* sehingga menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Sebagai contoh, sistem ekonomi neoliberalisme yang diterapkan di Indonesia telah menyebabkan para petani, nelayan, dan pekerja sektor informal terjerat oleh, dan sulit keluar dari, kemiskinan. Sebaliknya stimulus ekonomi, pajak dan iklim investasi lebih menguntungkan orang kaya dan pemodal asing untuk terus menumpuk kekayaan.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang begitu kompleks oleh karena itu diperlukan pendekatan dari berbagai bidang untuk memberikan solusi dari kondisi tersebut yang tentunya memiliki kesinambungan yang baik. Salah satu bidang ekonomi yang menjadi fokus pemerintah saat ini adalah ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif secara konsep pertama kali diperkenalkan oleh John Howkins (2001) dalam bukunya *Creative Economy, How People Make Money From Ideas*. Ekonomi kreatif menurutnya didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang menjadikan kreativitas, warisan budaya, dan lingkungan sebagai tumpuan masa depan (John Howkins, 2001). Proses penciptaan nilai tambah berdasarkan kreativitas, budaya, dan lingkungan inilah yang memberikan nilai tambah kepada suatu perekonomian. Intinya adalah produktivitas yang bersumber kepada orang-orang kreatif yang mengandalkan kemampuan ilmu pengetahuan yang dimilikinya.

Selain itu juga *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai proses penciptaan, produksi dan distribusi dari barang dan jasa yang menggunakan modal kreativitas

dan intelektual sebagai input utama dari proses produksi. Proses produksi ekonomi kreatif tersebut dapat dikatakan menggabungkan berbagai macam pengetahuan, intelektual dan kreativitas untuk memproduksi barang dan jasa serta jasa artistic dengan konten kreatif dan memberikan nilai tambah (UNCTAD, 2008). Tidak ingin ketinggalan dari negara lain, di dalam negeri sendiri diawali dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif yang menyebutkan ekonomi kreatif merupakan kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan pengertian dari tiga definisi di atas maka dapat dilihat bahwa ekonomi kreatif sangat menitikberatkan pada kekuatan ide kreativitas sehingga mampu menghasilkan produk yang mampu bernilai secara ekonomis. Hal inilah kemudian diharapkan mampu berkontribusi dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Belakangan ini perkembangan dan pembinaan ekonomi kreatif di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup baik dan ini dilakukan baik di oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bahkan saat ini pemerintah telah mengeluarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2009 sebagai Tahun Indonesia Kreatif dimasa pemerintahan Presiden SBY yang mencakup 14 sektor ekonomi kreatif hingga akhirnya berkembang lebih lanjut pada Perpres Nomor 72 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif dan berhasil menambahkan subsektor ekonomi kreatif baru menjadi 16 subsektor. Adapun ke 16 subsektor tersebut adalah sebagai berikut.

1. Industri periklanan, yakni: suatu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa periklanan seperti komunikasi satu arah

- dengan menggunakan medium tertentu.
2. Industri arsitektur, yakni: jasa konsultasi arsitek yang mencakup usaha seperti: desain bangunan, pengawasan konstruksi perencanaan kota.
 3. Industri barang seni, yakni: kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan barang-barang seni asli (orisinil), unik dan langka dan berasal dari masa lampau (bekas) yang dilegalkan oleh undang-undang dan memiliki nilai estetika seni yang tinggi.
 4. Industri kerajinan, yakni: industri yang menghasilkan produk-produk, baik secara keseluruhan dengan tangan atau menggunakan peralatan biasa, peralatan mekanis. Produk kerajinan tersebut dibuat dari *raw materials* dalam jumlah yang tidak terbatas.
 5. Industri desain. Dalam kaitannya dengan ekonomi kreatif akan dikembangkan dalam tiga kelompok disiplin ilmu desain, yaitu desain industri, desain grafis/desain komunikasi visual dan desain interior.
 6. Industri Fesyen adalah kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain pakaian dan desain aksesoris mode lainnya.
 7. Industri film, video dan fotografi adalah kegiatan yang terkait dengan kreasi, produksi video, film, dan jasa fotografi serta distribusi rekaman video.
 8. Industri permainan interaktif adalah kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi dan distribusi permainan komputer dan video.
 9. Industri musik adalah kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi/komposisi, pertunjukan musik, reproduksi dan distribusi dari rekaman suara.
 10. Industri seni pertunjukan, kegiatan ini berhubungan erat dengan seni drama, teater dan karawitan serta tari.
 11. Industri penerbitan dan percetakan, meliputi kegiatan kreatif yang terkait dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah dan tabloid.
 12. Industri layanan komputer dan piranti lunak yang meliputi kegiatan kreatif yang terkait dengan pengembangan teknologi informasi.
 13. Industri televisi dan radio yang berkaitan dengan usaha kreasi, produksi, dan pengemasan, penyiaran dan transmisi televisi dan radio.
 14. Industri riset dan pengembangan. Industri kreatif pada riset dan pengembangan meliputi kegiatan kreatif yang terkait dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapan ilmu dan pengetahuan untuk perbaikan produk dan kreasi produk baru, proses baru, material baru, alat baru, metode baru, dan teknologi baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar.
 15. Industri kuliner adalah kegiatan yang berkaitan dengan kuliner/masakan/makanan ciri khas Indonesia.
 16. Aplikasi dan *game developer*, yang meliputi kegiatan kreasi yang terkait dengan digitalisasi pada pengembangan aplikasi atau *game*.

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa sektor ekonomi kreatif memperoleh hubungan yang sangat penting dengan pariwisata dimana kedua hal ini memiliki hubungan saling menguntungkan antara satu sama lainnya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, mendefinisikan pariwisata sebagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Selain itu juga kawasan atau destinasi wisata. Sebagaimana dalam Undang-Undang yang sama menyebutkan bahwa kawasan wisata atau destinasi wisata merupakan kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrative yang di dalamnya terdapat

daya Tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Selain tentang kawasan atau destinasi wisata, di dalam Undang-Undang tersebut juga ikut mengatur tentang definisi dari Kawasan Strategis Pariwisata.. Kawasan Strategis Pariwisata dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan Pasal 1 ayat (10) menyebutkan merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti, pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Pembangunan pariwisata sendiri memiliki signifikan dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam aspek ekonomi sektor pariwisata mampu menyumbang devisa dari kunjungan wisatawan mancanegara, aktivitas ekonomi wisata domestik dan Produk Domestik Bruto (PDB) beserta komponen-komponennya. Dalam aspek sosial, pariwisata berperan dalam menyerap tenaga kerja, apresiasi seni, tradisi dan budaya bangsa, serta peningkatan jati diri bangsa. Dalam aspek lingkungan pariwisata dapat mengangkat produk dan jasa wisata seperti kekayaan dan keunikan alam dan laut dan alat yang efektif bagi pelestarian lingkungan alam dan seni budaya tradisional (Nugroho dan Negara: 2015). Berdasarkan pernyataan ini maka dapat dilihat bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara pariwisata dengan ekonomi kreatif yang saat ini sedang memperoleh perhatian lebih dari pemerintah.

Kegiatan wisata dalam kehidupan pedesaan atau pertanian, berkembang sejak lama. Hal ini dikenal dengan kegiatan wisata berbasis

masyarakat atau *community-based tourism* (CBT). Pemikiran ini merupakan variasi konsep keilmuan untuk mendukung kaidah-kaidah konservasi dalam pengembangan kegiatan wisata di desa. Ada tiga kegiatan pariwisata yang dapat mendukung konsep CBT yakni penjelajahan (*adventure travel*), wisata budaya (*cultural travel*), dan wisata lingkungan (*ecotourism*) (Nugroho dan Negara: 2015).

Sebagaiman jenis-jenis wisata yang lainnya ekowisata merupakan salah satu jenis dalam wisata desa yang memiliki perhatian khusus. Ekowisata dapat dikatakan sebagai salah satu bahasan penting yang dikedepankan dalam membangun wisata di desa. Ekowisata atau *ecotourism* adalah termasuk dalam kegiatan wisata yang berkelanjutan yang memenuhi *sustainable tourism*. *Sustainable tourism* adalah sektor ekonomi yang lebih luas dari ekowisata yang mencakup sektor-sektor yang lebih luas dari ekowisata yang mencakup sektor-sektor pendukung kegiatan wisata secara umum, meliputi wisata bahari (*beach and sun tourism*), wisata perdesaan (*rural and agro tourism*), wisata alam (*natural tourism*), wisata budaya (*cultural tourism*), atau perjalanan bisnis (*business travel*). Sehingga dapat dikatakan bahwa ekowisata berpijak pada tiga kaki sekaligus yakni wisata perdesaan, wisata alam, dan wisata budaya (Nugroho dan Negara: 2015).

Salah satu yang menjadi suatu bentuk kegiatan ekowisata pada kawasan tertentu yang melibatkan masyarakat lokal setempat adalah desa wisata. Menurut Priasukmana & Mulyadi (2001), Desa Wisata merupakan suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas atau menarik dan memiliki

kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta memiliki potensi untuk dikembangkanya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan-minuman, cinderamata dan kebutuhan wisata lainnya.

Setiap melakukan upaya pembangunan kita pasti akan memerlukan modal sebagai pondasi awal memulai proses pembangunan tersebut, Salah satu yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembangunan adalah modal sosial.

James Coleman (dalam Robert M Lawang, 2004) Modal sosial didefinisikan dengan fungsinya. Artinya modal sosial bukanlah sebuah entitas tunggal melainkan terdiri dari sejumlah entitas dengan dua elemen yang sama. Semuanya terdiri dari aspek struktur-struktur sosial dan memfasilitasi tindakan-tindakan tertentu dari aktor. Apakah orang per-orangan atau aktor-aktor badan hukum dalam struktur tersebut.

Selain itu juga Francis Fukuyama (2002) mendefinisikan modal sosial sangat longgar. Dia tidak bertolak dari definisi yang tegas tentang modal sosial, dan seringkali judul dari bab tidak sesuai dengan isinya, sampai saat ini definisi Fukuyama (dalam Robert M Lawang, 2004) Modal sosial merupakan serangkaian nilai dan norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjadinya sebuah kerjasama diantara mereka.

Selain itu juga Terdapat konsesus yang muncul mengenai definisi modal sosial yang dibangun di atas fondasi empiris yang semakin solid dan akhirnya menghasilkan definisi modal sosial yang mengacu pada norma dan jaringan yang memfasilitasi tindakan kolektif serta keluarga, teman, dan rekan keluarga seseorang merupakan aset penting, yang dapat dipanggil dalam krisis, dinikmati demi kepentingannya

sendiri, dan/atau dimanfaatkan untuk mendapatkan materi (Woolcock & Narayan (2000).

Saat ini modal sosial mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Di Indonesia salah satu ahli modal sosial adalah Robert M Lawang (2004) yang mendefinisikan Modal sosial menunjuk pada semua kekuatan sosial komunitas yang dikonstruksikan oleh individu atau kelompok dengan mengacu pada struktur sosial yang menurut penilaian mereka dapat mencapai tujuan individual dan atau kelompok secara efisien dan efektif dengan kapital-kapital lainnya.

Untuk melihat modal sosial sebagai sebuah upaya untuk menanggulangi kemiskinan maka digabunglah definisi dari Coleman (1988), Putnam (1995), WHO (1998), OECD (2001) dan Imandoust (2011) dalam Baiyegunhi (2014) yang mendefinisikan Modal sosial sebagai sekelompok nilai, norma, jaringan yang sangat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan rumah tangga di pedesaan.

Setelah melihat definisi dari ke empat pendapat dari beberapa ahli di atas maka diperoleh gambaran bahwa modal sosial memiliki kontribusi dalam upaya pengembangan masyarakat dalam satu wilayah. Berdasarkan uraian pendapat dari para ahli itupun diperoleh bahwa dampak yang dapat diperoleh dari Modal sosial dalam konteks ini dapat memberikan peran positif seperti sebagai kekuatan bersama dengan kapital-kapital lainnya, dalam pengembangan kapasitas dari masyarakat itu sendiri, serta tentunya terhadap pembangunan ekonomi.

Setelah melihat definisi terkait modal sosial maka selanjutnya kita akan melihat dimensi apa saja yang terdapat dalam modal sosial atau

modal sosial. Dalam praktiknya modal sosial atau modal sosial memiliki dimensi. Dimensi-dimensi modal sosial dapat diukur melalui indikator dari dimensi tersebut untuk mengukur modal sosial. Tidak ada metoda pengukuran yang baku untuk modal sosial sehingga setiap ahli kemudian mengembangkan sendiri metoda pengukuran mereka. Pengukuran modal sosial bisa secara kuantitatif, kualitatif, atau kombinasi diantara keduanya. Adapun dimensi modal sosial (Woolcock & Narayan (2000) adalah sebagai berikut;

1. Kelompok dan Jaringan

Modal sosial membantu menyebarkan informasi, mengurangi perilaku oportunistik, dan memfasilitasi pengambilan keputusan kolektif. Efektivitas yang dengan adanya modal sosial memberikan kesempatan untuk berkembangnya struktural, dalam bentuk asosiasi dan jaringan. Upaya untuk memenuhi peran ini tergantung pada banyak aspek dari kelompok-kelompok yang tercipta dari proses ini, yang mencerminkan struktur mereka, keanggotaan mereka, dan cara mereka berfungsi (Woolcock & Narayan (2000).

2. Kepercayaan dan Solidaritas

Kepercayaan dilihat dalam konteks transaksi tertentu, seperti peminjaman dan pinjaman (Woolcock et. al, 2000). Sementara itu solidaritas menurut Durkheim dalam Susan Kenny (1946) terbagi atas dua jenis yaitu solidaritas mekanik yang berarti hubungan sosial yang begitu intim, personal, meliputi keseluruhan, dan berdasarkan pada kesamaan identitas, nilai, dan kepercayaan. Sedangkan solidaritas organik merupakan sebuah hubungan yang tidak berdasarkan kesamaan melainkan tentang perbedaan

3. Tindakan Kolektif dan Kerjasama

Teori aksi kolektif menyangkut pengaturan dilema sosial di mana ada

sekelompok individu, kepentingan bersama di antara mereka, dan potensi konflik antara kepentingan bersama dan kepentingan masing-masing individu (Olson 1965 dalam Woolcock & Narayan (2000). Tindakan kolektif tentu erat kaitannya dengan hubungan antar dua atau lebih manusia. Dimana hubungan ini tidak akan lepas dari yang disebut dengan kerjasama. Menurut Soekanto (2002) kerja sama merupakan sebuah usaha bersama antara perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau tujuan bersama.

4. Informasi dan Komunikasi

Akses ke informasi semakin diakui sebagai pusat untuk membantu masyarakat miskin memiliki suara yang lebih kuat dalam hal-hal yang mempengaruhi kesejahteraan mereka (World Bank 2002). Informasi secara definisi dalam buku Sobur (2003) dibedakan menjadi dua perspektif yakni perspektif pengirim dan penerima. Pada perspektif pengirim menurut Eco (1979) dalam Sobur (2003) menjelaskan bahwa informasi menyajikan kebebasan pilihan yang tersedia dalam suatu seleksi peristiwa yang mungkin sedangkan dari sisi penerima menurut Nauta (1972) dalam Sobur (2003) memaparkan bahwa informasi merupakan hal yang umum bagi seluruh representasi yang serupa bagi interpreter, dan hal ini menurun secara tidak menentu. Berbicara informasi maka tidak akan lengkap apabila tidak membicarakan mengenai komunikasi. Komunikasi adalah bukti bahwa manusia adalah makhluk sosial, karena komunikasilah wadah manusia untuk dapat memenuhi dorongannya sebagai makhluk sosial. Menurut Setiadi dan Kolip (2011) komunikasi merupakan aksi antara dua pihak atau lebih yang melakukan hubungan dalam bentuk saling memberikan tafsiran pesan yang disampaikan oleh masing-masing pihak.

5. Kohesi Sosial dan Inklusi

“Komunitas” bukanlah entitas tunggal, melainkan ditandai oleh berbagai bentuk perpecahan dan perbedaan yang dapat menyebabkan konflik, oleh karena itu diperlukan adanya kohesi sosial yang apabila diartikan secara harafiah kohesi merupakan hubungan yang erat atau perpaduan yang kokoh, sedangkan sosial berarti masyarakat, sehingga kohesi sosial merupakan hubungan yang erat atau perpaduan yang kokoh diberbagai bidang yang berkaitan erat dengan masyarakat. (KBBI, 2019). Di sisi lain menurut Soetomo (2011) inklusi merupakan sebuah kondisi dimana masyarakat diseluruh lapisan terutama lapisan bawah memiliki peluang yang setara dalam berpartisipasi pada semua proses kehidupan, dalam mengakses semua pelayanan serta dalam mengakses informasi dan sumber daya.

6. Pemberdayaan dan Aksi Politik

Pada hakekatnya Individu “diberdayakan” sejauh mereka memiliki ukuran kendali atas institusi dan proses yang secara langsung mempengaruhi kesejahteraan mereka (World Bank 2002). Menurut Hmelink (1994) dalam Hogan (2000) pemberdayaan merupakan sebuah proses yang dilalui oleh setiap orang untuk mencapai kapasitas agar mampu untuk mengontrol keputusan yang dapat berpengaruh dalam kehidupan mereka. Melalui pemberdayaan mampu membuat setiap manusia paham dalam mendefinisikan diri mereka dan membangun identitas diri mereka sendiri. Pemberdayaan juga bisa berupa hasil dari sebuah strategi yang intensif yang diinisiatifkan secara eksternal dari agen pemberdayaan atau dimintakan langsung dari kelompok yang tidak berdaya. Selain itu upaya pemberdayaan akan sangat relevan dengan partisipasi dimana juga akan sangat relevan dengan

aksi politik yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dimana aksi politik juga sangat identic dengan partisipasi masyarakat dalam ikut serta disetiap proses pengambilan keputusan yang dilakukan di wilayah mereka (Woolcock & Narayan (2000).

Setelah mengetahui terkait dengan pengertian modal sosial terlihat bahwa setiap konsep dari berbagai jenis definisi modal sosial memiliki hubungan hubungan pembangunan masyarakat. Sebagaimana dalam artikel jurnal yang dibuat oleh Woolcock & Narayan (2000) pada artikel tersebut dijelaskan bahwa dalam berbagai penelitian menunjukkan bahwa terdapat implikasi yang jelas antara modal sosial terhadap pengembangan kebijakan dan penelitian saat ini. Ciri khas lain dari pendekatan modal sosial adalah pendekatannya untuk memahami kemiskinan. Hidup di pinggiran keberadaan, modal sosial orang miskin adalah satu-satunya aset yang dapat digunakan untuk membantu menegosiasikan jalan melalui dunia yang tidak dapat diprediksi. Sementara banyak dari gangguan seputar orang miskin dan ekonomi miskin adalah salah satu dari “defisit” kebijakan atas perspektif modal sosial dan hal ini memungkinkan para ahli teori, pembuat kebijakan, dan praktisi untuk mengambil pendekatan berdasarkan “aset”.

PENUTUP

Permasalahan kemiskinan perdesaan yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa adanya ketidakmerataan dalam proses pembangunan yang telah terjadi sampai saat ini. Diperlukan sebuah upaya strategis dalam mengembangkan ekonomi masyarakat yang ada di perdesaan yang tentunya menitikberatkan kepada kesinambungan program tersebut. Kesinambungan program sangat tergantung dari bahan yang digunakan dalam setiap program sehingga dengan konteks tersebut diperlukan program yang berorientasi pada kekuatan atau

potensi wilayah sehingga mampu dieksplorasi dan dirawat oleh masyarakat itu sendiri.

Upaya pengentasan kemiskinan tentu tidak akan lepas dari isu sumber daya alam dan sumber daya manusia yang bertindak sebagai pilar utama dalam menyusun ekonomi masyarakat perdesaan. Hal ini tentu sejalan dengan konsep ekonomi kreatif dan pariwisata itu sendiri, dimana kekuatan sangat *local oriented* yakni melihat potensi fisik maupun non fisik. Potensi fisik berarti sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut menjadi fokus dalam melakukan eksplorasi dan non fisik berarti modal sosial masyarakat dalam menggerakkan upaya eksplorasi tersebut. Melalui hal ini maka pembangunan yang berkesinambungan akan dapat tercapai karena modal pembangunannya berasal dari wilayah itu sendiri dan tidak berketergantungan terhadap pihak lainnya.

Berdasarkan hasil kajian literatur di atas, maka beberapa rekomendasi dalam upaya pengentasan kemiskinan perdesaan melalui pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata dan modal sosial sebagai berikut:

1. Membentuk sinergitas antara ekonomi kreatif, pariwisata dan modal sosial masyarakat sebagai satu kesatuan dalam upaya pengentasan kemiskinan pada wilayah perdesaan;
2. Memberikan masyarakat kesempatan untuk memiliki peran penting dalam proses pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata di wilayahnya;
3. Mengembangkan potensi sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada dimasyarakat dengan menitikberatkan pada pengembangan modal sosial seperti:
 - a. Pemanfaatan dan pengembangan kelompok dan jaringan masyarakat setempat;
 - b. Pemanfaatan dan pengembangan

kepercayaan dan solidaritas masyarakat setempat;

- c. Pemanfaatan dan pengembangan tindakan kolektif dan kerjasama masyarakat setempat;
 - d. Pemanfaatan dan pengembangan informasi dan komunikasi masyarakat setempat;
 - e. Pemanfaatan dan pengembangan kohesi sosial dan inklusi masyarakat setempat;
 - f. Pemanfaatan dan pengembangan pemberdayaan dan aksi politik masyarakat setempat.
4. Memfasilitasi pengembangan program dengan melibatkan partisipasi masyarakat, khususnya dalam menentukan fokus utama yang akan dilaksanakan dengan berbasis potensi sumber daya wilayah setempat.;
 5. Mengembangkan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan-perusahaan tertentu dalam mengembangkan program berbasis ekonomi kreatif, pariwisata dan modal sosial;
 6. Memberikan edukasi sebagai bentuk pengembangan sumber daya manusia masyarakat setempat;
 7. Memfasilitasi pengembangan produk prioritas yang menjadi ciri khas atau kekuatan dari wilayah tersebut dengan mempertimbangkan keberlanjutan dan upaya perbaikan kualitas dari produk tersebut;
 8. Memfasilitasi upaya promosi yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. (2012). *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- (2013). *Kesejahteraan Sosial: Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial,*

- dan Kajian Pembangunan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi, Abu. (2009). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andri, Donnal, Putera. (2018). Bekraf: Kontribusi Ekonomi Kreatif Ke PDB 2018 Lebih dari Rp. 1.000 Triliun. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/01/170900726/bekraf-kontribusi-ekonomi-kreatif-ke-pdb-2018-lebih-dari-rp-1.000-triliun>.
- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bodnar. (2000). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bogdan, Robert dan Steven Taylor. (1992). *Pengantar Metode Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Carunia, Mulya, Firdausy. (2018). *Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Data BPS. (2018). Persentase Penduduk Miskin Pada September 2018 Sebesar 9,66 Persen. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/01/15/1549/persentase-penduduk-miskin-pada-september-2018-sebesar-9-66-persen.html>. Di akses pada Mei 2019.
- Denzin, Norman K dan Lincoln, Yvonna, S. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Durkheim. (1995). *The Elementary Forms of The Religious Life*. New York: Pree Press.
- Fukuyama, Francis. (2002). *Trust Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Yogyakarta: Penerbit Qalam.
- Hasim & Remiswai. (2009). *Community Development Berbasis Ekosistem: Sebuah Alternatif Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Diadit Media.
- Hermasah, Tantan. (2014). *Kesinambungan dan Perubahan Komunitas Industri Kreatif di Bandung*. Depok: FISIP Universitas Indonesia.
- Hogan, Christine. (2000). *Facilitating Empowerment*. Londong: Stylus Publishing Inc.
- Howkins, J. (2001). *The Creative Economy: How People Make Money from Ideas*. London: Penguins Books.
- Jim Ife, & Frank Tesoriero. (2008). *Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Juli, Panglima, Saragih. (2017). *Pengembangan Industri Kreatif dalam Mendukung Kinerja Industri Nasional*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR.
- KBBI. (2019). Kohesi dan Sosial. <https://kbbi.web.id/kohesi>, <https://kbbi.web.id/sosial>. Di akses pada mei 2019.
- Kenny, Susan. (1946). *Developing Communities for The Future*. Victoria: Nelson Australia Pty Limited.
- Lawang, Robert M. (2004). *Modal Sosial dalam Perspektif Sosiologi: Suatu Pengantar*. Depok: FISIP UI Press.
- Li, Nan. (2001). *Social Capital A Theory of Social Structure and Action*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lloyd James S. Baiyegunhi Senior Lecturer.

- (2014). Social capital effects on rural household poverty in Msinga, KwaZulu-Natal, South Africa, *Agrekon: Agricultural Economics Research, Policy and Practice in Southern Africa*, 53: 2, 47-64, DOI: 10.1080/03031853.2014.915478.
- Neuman. W. Lawrence. (2003). *Social Research Method: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Allynand Bacon.
- Nugroho Iwan & Negara, D, Purnawan. (2015). *Pengembangan Desa Melalui Ekowisata*. Solo: Era Adicitra Intermedia.
- Partha Dasgupta, & Ismail Serageldin. (2000). *Social Capital: A Multifaceted Perspective*. Washington D.C: The World Bank.
- Pawito. (1994). *Teori-Teori Komunikasi. Buku Pegangan Kuliah Fisipol Komunikasi Massa SI Semester IV*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Pierre Bourdieu, & James Coleman. (1991). *Social Theory for a Changing Society*. New York: Westview Press.
- Priasukmana, Soetarso, Mulyadin. (2010). Pembangunan Desa Wisata: Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah. *Info Sosial Ekonomi*, Vol. 2, No. 1, 37-44.
- Pribadi, Wicaksono. (2018). Menteri Pariwisata: Program 10 Bali Baru Dorong Pertumbuhan. <https://bisnis.tempo.co/read/1069840/menteri-pariwisata-program-10-bali-baru-dorong-pertumbuhan/full&view=ok>.
- Sakina Rakhma Diah Setiawan. (2018). Turun Jumlah Populasi Miskin Ekstrim di Dunia Mencapai 736 juta. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/21/102951826/turun-jumlah-populasi-miskin-ekstrim-di-dunia-mencapai-736-juta>.
- Setiadi, M Elly, & Kolip, Usman. (2011). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana
- Sobur, Alex. (2003). *Semiotika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soerjono, Soekanto. (2002). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soetomo. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sofyan Yamin. (2015). *Pengentasan orang miskin di Indonesia: peran modal sosial yang terlupakan = Poverty alleviation in Indonesia: the missing link of social capital*. Lib.ui.ac.id.
- Suharto, Edi. (2006). *Membangaun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Swanson, K.M. (2001). Swanson 's Caring Theory: Caring Profesional Scale. *Journal of Nursing Scholarship*.
- Tia Dwitiani Komalasari. (2018). Masih Ada 14.461 Desa Tertinggal. <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2018/12/10/masih-ada-14461-desa-tertinggal-434204>. Diakses pada Mei 2019.
- Woolcock, M. D. Narayan. (2000). *Social Capital: Implication for Development Theory, Research, and Policy*. World Bank Research Observe, 15(2), August.

..... (2000). *Reducing Poverty By Building Partnerships Between States, Markets And Civil Society*. World Bank Research Observe, 15(3), August.

Woolcock, Nora Dudwick, Kathleen Kuehnast, et.l. (2003). *Analyzing Social Capital in Context*. Washington: World Bank.

World Bank. (2002). *Empowerment and Poverty Reduction; A Sourcebook* Washington DC: World Bank.

World Bank. (2002). *Empowerment and Poverty Reduction; A Sourcebook* Washington DC: World Bank.